

BAB IV

Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

ASEAN Regional Forum *on cybersecurity initiatives* merupakan bentuk upaya ASEAN meningkatkan keamanan siber dikawasan Asia Tenggara. Implementasi dari kelima strategi tersebut dapat dilihat melalui kesepakatan ARF *Statement on Cooperation in Ensuring Cyber Security* pada tahun 2012 di Pnom Penh. Dari penelitian ini, memiliki kesimpulan yaitu pada strategi pertama *“Promote further consideration of strategies to address threats emerging in this field consistent with international law and its basic principles”* dalam penerapannya belum maksimal dikarenakan norma yang telah di tetapkan oleh UNGGE tidak sesuai dengan kepentingan domestik tiap negara.

Pada strategi kedua *“Promote dialogue on confidence-building, stability, and risk reduction measures to address the implications of ARF participants' use of Information and Communication Technology (ICTs), including exchange of views on the potential use of ICTs in conflict”* di implementasikan melalui workshop sesuai dengan tujuannya yaitu membahas mengenai membangun kepercayaan antar negara anggota, langkah – langkah mengurangi ancaman serangan siber sehingga dapat menciptakan stabilitas di kawasan. Strategi ketiga *“Encourage and enhance cooperation in bringing about culture of cybersecurity”* Mempromosikan strategi, budaya dan norma yang disepakati dalam keamanan siber di kawasan Asia Tenggara menjadi prioritas utamanya. Dimana prinsip non-intervensi masih dipromosikan dalam kerjasama-kerjasamanya.

Strategi ke empat “*Develop an ARF work plan on security in the use of Information and Communication Technology (ICTs), focused on practical cooperation on confidence building measures, which could set out corresponding goals and a timeframe for their implementation*” Pada tahun 2015, ASEAN melalui ARF on cybersecurity initiative, mengembangkan rencana kerja Forum Regional ASEAN ISM on ICTs security. Rencana kerja ini merupakan hasil dari berbagai pertemuan yang diadakan ARF sesuai dengan maksud dan tujuan masing-masing forum. ARF kemudian merekomendasikan kegiatan yang lebih kolaboratif, salah satunya adalah menyelenggarakan kelompok belajar dialog terbuka antar anggota ARF. Strategi kelima “*Review a possibility to elaborate common terms and definitions relevant to the sphere of the use of Information and Communication Technology (ICTs)*” salah satu implementasi dari rencana kerja tersebut adalah pembentukan Pertemuan Antar-Sesi Forum Regional ASEAN tentang Keamanan dan Penggunaan TIK. Teknologi Informasi dan Komunikasi (ARF ISM on ICTs Security) pada tahun 2017 sebagai forum berkelanjutan dengan harapan dapat menjadi forum diskusi mengenai permasalahan keamanan siber. Meski kelima strategi tersebut belum secara maksimal dalam penerapannya namun dibuktikan melalui *Global Cybersecurity Index* yang dikeluarkan oleh *International Telecommunication Union* dimana terjadi peningkatan yang cukup baik pada *cyber security* negara-negara Asia Tenggara.

Terlepas dari upaya yang telah dilakukan, ASEAN melalui ARF tidak dapat secara langsung mengatasi konflik siber di kawasan Asia Tenggara karena sejumlah alasan. Perbedaan realitas dan kepentingan domestik masing-masing

negara juga menimbulkan tantangan dalam menerapkan kelima taktik ini. Konsep non-intervensi ASEAN juga menjadi sumber kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

4.2 Saran

Melalui ARF, ASEAN dapat meningkatkan upayanya dalam aktivitas keamanan siber. ASEAN juga harus memperoleh kemampuan keamanan siber yang dimiliki Singapura, Malaysia, dan negara-negara selain ASEAN yang tergabung dalam ARF, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Rusia. ASEAN harus menggunakannya sebagai model untuk mengembangkan kapasitas keamanan siber di negara-negara seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja.

Upaya membangun budaya keamanan siber dan norma-norma yang dapat diterima di kawasan Asia Tenggara harus terus menjadi perhatian karena beragamnya latar belakang dan kepentingan masing-masing negara. Kebudayaan yang akan dibangun tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ASEAN.

Untuk menyelesaikan konflik siber di masa depan, ASEAN harus mampu menciptakan mekanisme hukum yang mengikat negara-negara anggota ARF. Hal ini bukanlah tugas yang mudah karena negara-negara yang terlibat harus saling percaya. Setiap negara di ranah internasional memiliki kesetaraan yang sama dalam sistem internasional yang anarkis. Oleh karena itu, untuk mengembangkan instrumen hukum yang mengikat, pemerintah harus rela menyerahkan sebagian kedaulatannya.